



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

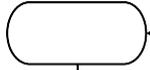
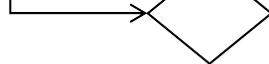
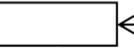
Nomor SOP : 014/SJ.5/PPID/II/2023
Tgl Pembuatan : 10 Januari 2023
Tgl Efektif : 15 Februari 2023
Tgl Pengesahan : 15 Februari 2023

Disahkan oleh : Kepala Biro Humas dan KLN


Ari Prabowo
NIP.

Nama SOP : Uji Konsekuensi

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	PPID KKP/PPID Unit Kerja Eselon I	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	PPID KKP	Atasan PPID KKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan usulan kajian informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik					Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	30 menit	Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi Unit Kerja Eselon I					Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	3 hari	konsep kajian	
3	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP, apabila permohonan uji konsekuensi menyatakan bahwa informasi masuk pada kategori Informasi Publik, maka informasi akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi					konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID					rekomendasi	3 hari	Konsep SK	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan					Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID Unit Kerja Eselon I	